**lakip dinas pariwisata dan kebudayaan t.a. 2022**

**KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kami mengucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas anugerah kesempatan yang diberikan Allah kepada kami sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2022 ini dapat diselesaikan. Terlebih banyaknya hambatan, rintangan dan tantangan yang dihadapi berupa ketersediaan data, keterbatasan peralatan kerja, kekurangan personil serta kesempatan yang cukup sempit akibat banyaknya laporan dan pekerjaan yang deadline di akhir bulan Januari dan Pebruari.

Berdasarkan surat dari Sekretariat Daerah, Tanggal 09 Januari 2023, Nomor 060/30/I/2023/Org, Perihal Penyampaian LAKIP Perangkat Daerah, Laporan LAKIP OPD paling lambat disampaikan tanggal 06 Februari 2023 kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi. Namun kendala di lapangan, data PAD Kabupaten dan PAD Sektor Pariwisata belum tersedia sehingga belum dapat difinalkan hingga waktu yang ditentukan. Namun kekurangan ini memberikan semangat dalam menyelesaikan sesegera mungkin dan sesempurna mungkin.

Program kegiatan yang telah direncanakan di awal tahun 2022 telah dilaksanakan dan disesuaikan dengan capaian perjanjian kinerja dalam dokumen TAPKIN (Indikator Kinerja Utama). Capaian utama adalah dari Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Di tahun 2022, PAD Disparbud sebesar Rp. 13.529.000,- yang bersumber dari Penyewaan Alat Selam dan retribusi masuk ke Tamamelong.

Selain itu, dari Urusan Kebudayaan telah melakukan Pemutahiran Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Kepulauan Selayar, serta operasionalisasi Museum Nekara (Dana DAK Non Fisik). Pengusulan Sinrilik Bulaengna Parangia untuk didaftarkan di pencatatan WBTB tingkat pusat namun mengalami sedikit kendala yang harus dilengkapi untuk diusulkan ulang di tahun berikutnya.

Terima kasih disampaikan kepada Bapak/ Ibu yang telah meluangkan waktu dalam penyelesaian Laporan ini, juga yang telah memberikan data-data penting yang dibutuhkan untuk keperluan penyusunannya. Bila dalam penyusunan LAKIP ini didapati kekurangan-kekurangan, semoga pembaca dan yang berkepentingan terhadap laporan ini dapat diberikan saran dan masukan untuk menyempurnakan laporan ini kedepannya

Benteng, 4 Pebruari 2022

Kepala Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan,

**Drs. Hizbullah Kamaruddin**

NIP. 196702261986031003

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL**  i

**PENGANTAR** ii **DAFTAR ISI** iii

**DAFTAR GAMBAR** iv

**DAFTAR TABEL**  v

**BAB I PENDAHULUAN** 1

1. Latar Belakang 1
2. Maksud dan Tujuan 2
3. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah 2
4. Isu-isu Strategis 3

**BAB II** **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**  4

1. Rencana Strategis 4
2. Indikator Kinerja Utama 15
3. Rencana Kerja Tahunan 16
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 19

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**  21

1. Pengukuran Kinerja 21
2. Analisis Capaian Kinerja 26
3. Realisasi Keuangan 27

**BAB IV PENUTUP** 30

LAMPIRAN

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2022 per 31 Desember 2022

RKT 2022 dan PKK 2022

Rencana Aksi 2022

Pohon Kinerja 2022/ Cascading Disparbud 2022

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. kegiatan selayar Expo yang merupakan rangkaian FTB 2022 22

Gambar 2. Foto Aktivitas Selayar Expo dari drone 23

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1. Matriks Swot Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 10

Tabel 2.2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 11

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama dan Targetnya 15

Tabel 2.4 Rencana Kerja Tahunan sesuai DPA Pokok T.A. 2022 16

Tabel 2.5 Perjanjian kinerja Dinas pariwisata dan Kebudayaan 20

Tabel 3.1. Indikator Kinerja Utama 1 21

Tabel 3.2. Indikator Kinerja Utama 2 23

Tabel 3.3. Indikator Kinerja Utama 3 25

Tabel 3.3. Indikator Kinerja Utama 4 26

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Mendorong Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. **Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan LAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah :

* Sebagai alat ukur pelaksanaan program kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
* Sebagai bahan evaluasi atas kinerja terhadap informasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
* Memenuhi kewajiban seperti yang diamanatkan dalam regulasi yang ada.

Tujuan dari penyusunan LAKIP 2023 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah sebagai laporan pertanggungjawaban anggaran yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas selama tahun 2022.

1. **Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan daerah bidang pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Bertempat di Jalan Jend. Sudirman No. 4 Benteng dengan titik koordinat lokasi berada diantara 6° 07’ 06.3” LS / 120° 27’31.2” BT, kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan salah satu situs dan bangunan cagar budaya di Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 603 Tahu n 2018 tentang Penetapan Lokasi dan Gedung Dinas Kepariwisataan sebagai Situs dan Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.

Sebagai unsur pelaksana urusan pariwisata dan kebudayaan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan termasuk kedalam kantor tipe A yang terdiri dari Sekretariat dan 4 Bidang yaitu Bidang Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, SDM dan Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan.

1. **Isu-isu Strategis**

Ada beberapa isu-isu strategis yang menjadi topik trending di 2022, dan sangat menentukan dalam pengambilan keputusan ke depan untuk percepatan pembangunan yang lebih meroket di tahun berikutnya :

1. Perubahan paradigma berwisata di seluruh dunia yang lebih memperhitungkan dampak keberlangsungan lingkungan, sosial dan ekonomi ( sustainable tourism). Sehingga bukan lagi jumlah wisatawan yang banyak berkunjung menjadi tolok ukur keberhasilan pariwisata (mass tourism) tetapi juga dampak negatif dari kegiatan wisata dapat ditekan serendah mungkin. Wisata ini sering disebut wisata minat khusus atau ekowisata.
2. Pemulihan terhadap pandemi covid-19. Pemerintah telah melonggarkan kegiatan masyarakat dan karantina bagi perjalanan dari luar negeri, sehingga roda perekonomian bisa kembali berjalan normal begitu juga pariwisata.
3. Dampak dari ketegangan dunia yakni perang Rusia dan Ukraina yang sudah berlangsung selama setahun, juga meningkatnya eskalasi potensi perang antara AS dengan China terkait Taiwan. Hal ini perlu diantisipasi terkait ketersediaan pangan di dalam negeri, ketersediaan bbm dan terjangkaunya harga barang- barang yang dipengaruhi oleh ekspor impor serta penurunan nilai mata uang Rupiah terhadap dollar.

**BAB II**

**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

1. **Rencana Strategis**

Visi Pembangunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, menggunakan pijakan visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 - 2026 yang merupakan visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih, **H. MUH. BASLI ALI** dan **H. SAIFUL ARIF** Yaitu :

***“ KEPULAUAN SELAYAR SEBAGAI BANDAR MARITIM KAWASAN TIMUR INDONESIA ”***

***“ BANDAR MARITIM ”*** mengandung pengertian seluruh kegiatan berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri; dan

***“ KAWASAN TIMUR INDONESIA ”*** berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hubungan) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah TelukBone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Dari visi ini, diwujudkan dengan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang dibebankan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yaitu :

Untuk terwujudnya visi pembangunan daerah maka misi pembangunan daerah yang hendak dicapai pada 2021-2026 yang diemban oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah :

***Mengembangkan Tata kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.***

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik,yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi, yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelaynaan publik yang berkualitas.

***Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman.***

Misi ini mengandung makna adalah pengembangan motor penggerak ekonomi masyarakat akan difokuskan pada pemanfaatan potensi kelautan (termasuk jasa kelautan dan pariwisata bahari) dan potensi perikanan dengan segenap keunggulan yang dimiliki.

***Meningkatkan Pembinaan Kehidupan sosial dan Keagamaan.***

Misi ini mengandung makna adalah memastikan terhubungnya segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat dengan fundamental keagamaan sebagai landasan dan arah hidup masyarakat sebagai khalifah.

**Tujuan dan Sasaran Strategis**

Tujuan dan sasaran merupakan salah satu penjabaran dari Vis dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten, dan menjadi acuan dalam merumuskan tujuan dan sasaran dari Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Tujuan dan sasaran Renstra ini merupakan dampak keberhasilan dari perogram kegiatan yang dilaksanakan Dians Pariwisata dan Kebudayaan. Sementara tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mendukung Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategi daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan dari rencana strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2021 - 2026 adalah sama dengan rencana strategis RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar, sementara sasaran dari Renstra Disparbud menjadi penjabaran dari Tujuan tersebut yang dijelaskan sebagai berikut :

**Misi 1**

Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan, memiliki **Tujuan** Pembangunan :

**Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**, dengan indikator nilai SAKIP Dinas Pariwisata dan kebudayaan dari Inspektorat.

**Sasaran**-nya adalah :

**Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**, dengan indikator nilai akumulasi komponen SAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan , dan

**Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset, daerah** dengan indikator Laporan Keuangan OPD sesuai dengan SAP.

**Misi 4**

**Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan**, mimiliki **Tujuan** Pembangunan :

**Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas usaha Pariwisata,** Indikatornya adalah Persentase kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten.

**Sasaran**-nya adalah :

**Meningkatnya kontribusi PAD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap PAD sektor Pariwisata**, dengan Indikator Persentase Kontribusi PAD dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap PAD sektor Pariwisata.

**Misi 5**

**Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan**, memiliki **Tujuan** Pembangunan :

**Mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman**, indikatornya adalah Persentase partisipasi aktivitas budaya daerah dalam pembangunan.

**Sasaran**-nya adalah :

**Mengakarnya nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat** dengan indikator persentase warisan budaya benda dan tan benda yang menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari.

**Strategi**

Strategi dan Arah Kebijakan dalam renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah strategi dan kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pariwisata menunjukkan bagaimana cara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan target kinerja hasil (outcome) program yang terdapat dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bagi setiap program prioritas.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (strategic objective).

Bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selain menentukan bagaimana mencapai tujuan dan sasaran Renstra dan mensukseskan pilar KEK Pariwisata dan Program Gerbang Sari sebagai pilar pembangunan dan program unggulan dalam RPJMD.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata berupa :

a. Ditetapkannya KEK Pariwisata.

b. Dimulainya pembangunan prasarana dasar/ infrastruktur pendukung di luar kawasan.

Dalam buku Pedoman Desa Wisata (Kementerian Pariwisata, 2019), tren perjalanan wisatawan saat ini mengalami perubahan yaitu dari wisata massal ke arah wisata alternatif. Perubahan ini mengarah pada jenis kegiatan wisata yang berorientasi pada wisata alam atau budaya lokal dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, petualangan dan belajar. Dan juga wisata yang menawarkan pengalaman langsung kepada wisatawan seperti wisata perdesaan.

Perubahan dari wisata massal menjadi wisata alternatif ini memberikan keuntungan bagi desa wisata untuk menjadi pilihan dalam pengembangan pariwisata. Karena pada desa wisata umumnya memiliki keragaman produk yang dapat ditawarkan kepada wisatawan dengan produk utama yaitu kehidupan sehari-hari masyarakat di desa. Pengalaman yang diberikan kepada wisatawan berupa keragaman budaya, keunikan alam dan karya kreatif di desa.

Desa wisata dapat dilihat berdasarkan kriteria :

1. Memiliki potensi daya tarik wisata (daya tarik wisata alam, budaya dan buatan/ karya kreatif).
2. Memiliki komunitas masyarakat.
3. Memiliki potensi sumber daya manusia lokal yang dapat terlibat dalam aktivitas pengembangan desa wisata.
4. Memiliki kelembagaan pengelolaan.
5. Memiliki peluang dan dukungan ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana dasar untuk mendukung kegiatan wisata.
6. Memiliki potensi dan peluang pengembangan pasar wisatawan.

Namun pada prinsipnya, pengembangan produk desa wisata perlu memperhatikan :

* **Keaslian :** atraksi yang ditawarkan adalah aktivitas asli yang terjadi pada masyarakat di desa tersebut.
* **Masyarakat Setempat :** merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat dan menjadi keseharian yang dilakukan oleh masyarakat.
* **Keterlibatan Masyarakat :** masyarakat terlibat secara aktif di dalam aktivitas desa wisata.
* **Sikap dan Nilai ;** tetap menjaga nilai-nilai yang dianut masyarakat dan sesuai dengan nilai dan norma sehari-hari yang ada.
* **Konservasi dan daya dukung :** tidak bersifat merusak baik dari segi fisik maupun sosial masyarakat dan sesuai daya dukung desa dalam menampung wisatawan.

Dalam survey yang dilakukan pada era pemerintahan Orde Baru, tercatat bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 17.480 pulau. Namun dalam survey lanjutan yang dibuat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Agustus 2010, tercatat bahwa saat ini Indonesia hanya memiliki 13.446 pulau (sumber : Hukum perubahan iklim perspektif global dan nasional).

Olehnya itu, berdasarkan kenyataan tersebut perlu dikembangkan wisata berkelanjutan yang salah satunya adalah ekowisata dimana dalam ekowisata termasuk didalamnya wisata perdesaan. Dan ini menegaskan bahwa desa wisata menjadi salah satu destinasi unggulan alternatif masa depan.

Berdasar hal di atas maka, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akan mendorong peningkatan status desa melalui program desa wisata yang awalnya memprioritaskan 5 desa wisata unggulan. Desa tersebut adalah Desa Menara Indah, Desa Polassi, Desa Patilereng, Desa Bontomarannu, dan Desa Bahuluang. Namun tidak menutup kemungkinan juga desa-desa lain terutama desa-desa di Kawasan Taman Nasional Takabonerate.

Namun pengembangan desa wisata ini akan dikembangkan berdasarkan tahapan pengembangan desa wisata yaitu ada desa yang masih menjadi rintisan, berkembang, maju dan hingga akhirnya mandiri. Pengembangannya juga akan diprioritaskan atas 5 (lima) destinasi unggulan (desa wisata/destinasi wisata lain) agar dapat lebih fokus. Olehnya itu perlu dilakukan penetapan objek daya tarik wisata dan destinasi wisata di tahun pertama/ kedua pelaksanaan Renstra 2021-2026.

Untuk menentukan strategi yang akan dilakukan maka dilakukan pemilihan lewat matriks SWOT :

**Tabel 2.1**

**Matriks Swot Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**



**Arah Kebijakan**

Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/ fokus, konkrit, dan operasional. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pariwisata agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum. Arah kebijakan disusun per sasaran dan dijabarkan per tahun.

**Tabel 2.2**

**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

**Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Visi : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia** | | | |
| **Misi V : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan** | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman (T.1) | Mengakarnya nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat (S.1) | Penggalian nilai budaya dan kearifan lokal yg mendukung jalannya pembangunan di Kepulauan Selayar | Melakukan survey dan pendukungan terhadap kegiatan bersifat kearifan lokal |
|  |  | Pelestarian kesenian tradisional daerah | Pelaksanaan event kebudayaan tahunan |
|  |  | Pelestarian dan pengelolaan Sejarah daerah | Penggalian sejarah lokal daerah dan mendorong penyusunan buku sejarah daerah |
|  |  | Pelestarian cagar budaya daerah | Mendaftarkan objek diduga cagar budaya daerah secara menyeluruh |
|  |  | Peningkatan pengelolaan museum | Pemanfaatan museum sebagai sarana pendidikan dan ilmu pengetahuan |
| **Misi IV : Mengembangkan Pengelolaan potensi kelautan** | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha pariwisata T-2) | Meningkatnya kontribusi PAD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap PAD sektor Pariwisata (S-2) | Pengembangan daya tarik dan destinasi unggulan | Meningkatkan amenitas dan pengembangan desa wisata serta mendorong investasi |
|  | Peningkatan pemasaran pariwisata | Mengadakan promosi efektif dan pengemasan event dan atraksi daerah |
|  | Pengembangan SDM dan Ekonomi kreatif | Pelaksanaan pelatihan dan penyediaan sentra ekonomi kreatif |

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi tersebut, maka Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

* + 1. Program Pengembangan Kebudayaan

Program pengembangan kebudayaan ditujukan untuk kegiatan pengelolaan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Selayar, pelestarian kesenian tradisional dan pembinaan lembaga adat.

* + 1. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program pengembangan kesenian tradisional ditujukan untuk kegiatan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

* + 1. Program Pembinaan Sejarah

Program Pembinaan Sejarah ditujukan untuk meningkatkan pembinaan sejarah lokal yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan melakukan pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal, penyediaan sarana dan prasarana pembinaan sejarah dan peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah.

* + 1. Program Pengelolaan Permuseuman

Program Pengelolaan Permuseuman diarahkan untuk meningkatkan kunjungan masyarakat ke museum dan untuk meningkatkan tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan di museum melalui pengembangan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia permuseuman, peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum, serta revitalisasi sarana dan prasarana museum.

* + 1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata melalui penyiapan dokumen perencanaan kawasan destinasi, peningkatan amenitas kawasan, pembukaan akses ke destinasi, pengelolaan kawasan pariwisata, serta peningkatan profesionalisme dalam industri pariwisata.

* + 1. Program Pemasaran Pariwisata

Program Pemasaran Pariwisata diarahkan untuk bagaimana memperkenalkan, mengajak, serta memberi kesan yang baik kepada wisatawan melalui kegiatan-kegiatan promosi dan atraksi wisata dan melakukan analisis terhadap pasar wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain itu, dilaksanakan fasilitasi pemasaran sebagai ajang promosi pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar dan berbagai hal dalam mendukung peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata.

* + 1. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini diarahkan untuk peningkatan kualitas SDM masyarakat pariwisata, peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak atau lembaga pariwisata lainnya. Selain itu juga ditujukan untuk fasilitasi dalam pengembangan dan peningkatkan kualitas ide-ide maupun inovasi dalam pengembangan ekonomi berbasis kreativitas, sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

* + 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini adalah program penunjang atau pendukung kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD, diantaranya adalah kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diperuntukkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi ASN dalam menyusun dokumen perencanaan dan dokumen laporan kinerja OPD, kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang ditujukan untuk pelayanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan penyusunan pelaporan keuangan OPD yang dibutuhkan. Selain itu, pada program ini juga ditujukan untuk menunjang ketersediaan pelayanan administrasi umum perangkat daerah, ketersediaan pelayanan jasa penunjang urusan perangkat daerah, serta ketersediaan pelayanan pemeliharaan barang penunjang urusan perangkat daerah.

1. **Indikator Kinerja Utama**

Berdasarkan Rencana Kerja Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2021- 2026, maka ditetapkanlah sasaran dari rencana strategis tersebut yang disebut Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata yang akan diemban selama periode 2021 – 2026. Indikator tersebut adalah seperti tabel 2.3.

**Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama dan Targetnya**



1. **Rencana Kerja Tahunan**

Berdasarkan hasil tahapan yang telah dilalui dari penyusunan RKA 2022, hingga penyusunan DPA pokok 2022, Dinas Pariwisata mendapat Pagu anggaran sebesar **Rp. 9.616.278.525,-** yang terdiri dari belanja operasi dan modal. Perlu diketahui pagu ini sudah termasuk belanja GAJI dan tunjangan ASN sebesar Rp. 3.173.973.432,-. Untuk lebih jelasnya, secara ringkas dapat dilihat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.4 Rencana Kerja Tahunan sesuai DPA Pokok T.A. 2022**









1. **Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

Berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan di atas, maka dibuatlah perjanjian kinerja antara Bupati dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Perjanjian ini menjadi target atau indikator kinerja keberhasilan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan program kerja di tahun 2022. Perjanjian ini disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Perjanjian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.5 Perjanjian kinerja Dinas pariwisata dan Kebudayaan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **SASARAN RENSTRA** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **TARGET** |
| 1. | Kontribusi PAD dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap PAD sektor Pariwisata | Persentase kontribusi PAD dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap PAD sektor Pariwisata | 1,5% |
| 2. | Mengakarnya nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat | Persentase warisan budaya benda dan tan benda yang menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari | 30 % |
| 3. | Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Nilai akumulasi komponen SAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 71 |
| 4. | Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah | Laporan Keuangan OPD sesuai SAP | Sesuai |

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

1. **Pengukuran Kinerja**

**Tabel 3.1. Indikator Kinerja Utama 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **SASARAN RENSTRA** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **TARGET** | **REALISASI** |
| 1. | Kontribusi PAD dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap PAD sektor Pariwisata | Persentase kontribusi PAD dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap PAD sektor Pariwisata | 1,5% | 0,48% |

PAD dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Retribusi dari pemakaian kekayaan daerah (Alat Diving), terealisasi sebesar **Rp. 12.100.000,-** dari target di DPA TA.2022 Rp. 20.000.000,-
2. Retribusi tempat rekreasi ( Objek Wisata Pantai Tamamelong), terealisasi sebesar **Rp. 1.429.000,-** dari target di DPA TA. 2022 Rp. 5.000.000,-

Sementara PAD dari Sektor Pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Pajak Hotel (dikelola oleh BPKPD), terealisasi sebesar Rp 177.338.361,- di tahun 2022.
2. Pajak Restoran (dikelola oleh BPKPD), terealisasi sebesar Rp 2.541.891.847,- di tahun 2022.
3. Pajak Hiburan (dikelola oleh BPKPD), terealisasi sebesar Rp. 30.351.900,- di tahun 2022.
4. Retribusi Pemakaian kekayaan daerah ( dikelola oleh DISPARBUD), terealisasi sebesar Rp. 13,529.000,- di tahun 2022.
5. Retribusi tempat penginapan, Pasanggrahan, Villa, (dikelola oleh BPKPD), terealisasi sebesar Rp. 30.725.000,- di tahun 2022.

Sehingga didapatkan persentase realisasi penerimaan PAD Dinas Pariwisata terhadap PAD sektor pariwisata sebesar :

(Rp 13.529.000,- / Rp 54.165.561.423,63) x 100% = **0,48%**

(IKU Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)

Ada 3 (tiga) bidang yang mengampu IKU ini yaitu Bidang Destinasi Pariwisata, Bidang Pemasaran Pariwisata dan Bidang SDM dan Ekonomi Kreatif. Dari aktivitas yang dilaksanakan Bidang Destinasi Pariwisata berupa penggunaan Dana DAK Fisik untuk pembangunan Sarana dan Prasarana Destinasi di Puncak Tana Doang, serta DAK Non Fisik dengan pelaksanaan pelatihan pengelolaan destinasi yang baik. Terkait Bidang Pemasaran Pariwisata, aktivitasnya berupa pelaksanaan Event Festival Taka Bonerate (FTB 2022).



Gambar 1. kegiatan selayar Expo yang merupakan rangkaian FTB 2022



Gambar 2. Foto Aktivitas Selayar Expo dari drone

Terkait Bidang SDM dan Ekonomi Kreatif, juga menggunakan anggaran DAK Non Fisik berupa pelatihan peningkatan SDM Pariwisata seperti pelatihan digitalisasi randing pemasaran dan penjualan, Pengelolaan desa wisata, peningkatan inovasi dan hygienitas sajian kuliner dan pemandu wisata budaya.

**Tabel 3.2. Indikator Kinerja Utama 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **SASARAN RENSTRA** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **TARGET** | **REALISASI** |
| 2. | Mengakarnya nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat | Persentase warisan budaya benda dan tan benda yang menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari | 30 % | 40% |

Sebagaimana diketahui, warisan budaya benda dan tan benda yang menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan UU No. 5 Tahun 2017 tentang objek pemajuan kebudayaan dibagi menjadi 10 objek yaitu :

1. Adat Istiadat
2. Tradisi Lisan
3. Ritus
4. Pengetahuan Tradisional
5. Teknologi Tradisional
6. Seni
7. Bahasa
8. Permainan Rakyat
9. Olah raga Tradisional
10. Manuskrip

Serta ditambah cagar budaya sebagai warisan budaya benda.

Kegiatan yang dilakukan di tahun 2022 ini, terkait program pengembangan kebudayaan adalah Pemutakhiran dokumen PPKD (Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota , dengan Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan), sementara dari Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota dengan Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya adalah pendaftaran Sinrilik Bulaengna Parangia menjadi WBTB tingkat nasional namun tertunda karena masih ada persyaratan yang harus dipenuhi sehingga akan dilanjutkan tahun 2023.

Sementara dari Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya keluarannya adalah pembuatan pagar dan pemeliharaan jangkar dan gong nekara. Juga pendaftaran benda diduga Cagar Budaya dibeberapa tempat di Kepulauan Selayar.

Terkait DAK NON FISIK untuk museum pembinaan ini (WBTB dan Benda ) dilakukan dengan lomba-lomba di museum seperti Lomba Alur Kisah, Lomba Vlog, Publikasi museum melalui media cetak dan media elektronik, pameran, lomba merekonstruksi keramik/gerabah, belajar bersama museum, lomba edukatif kultural museum, lomba desain batik selayar, dan seminar hasil kajian koleksi).

Dari pendataan yang dilakukan, semua Objek Pemajuan Kebudayaan masih ada dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar. Apakah itu pada upacara-upacara adat maupun kegiatan kemasyarakatan. Pada lomba-lomba 17 agustusan kebanyakan masih mencirikan budaya Selayar seperti lomba A’bangkeng ka’daro. Namun ada sebagian pula yang tidak lagi dimainkan atau dilakukan di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh pengaruh penggunaan HP, penggunaan teknologi baru seperti alat memasak, alat kerja, penggunaan bahasa Indonesia dan Asing disekolah-sekolah, dll. Sehingga kami memberikan 50% untuk realisasi mengakarnya nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat. 40% itu adalah ( sebagian permainan rakyat, adat istiadat, ritus, seni, sebagian olahraga tradisional, manuskrip namun sudah jarang yang mampu membaca manuskrip apalagi menjadi bacaan)

**Tabel 3.3. Indikator Kinerja Utama 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **SASARAN RENSTRA** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **TARGET** | **REALISASI** |
| 3. | Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Nilai akumulasi komponen SAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 71 |  |

Untuk melihat kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan kebudayaan, dapat dilihat dari realisasi hasil penilaian SAKIP di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar. Nilai yang diberikan di tahun 2021 adalah 61,48 (B). Dari dokumen yang harus disediakan, 100% tersedia, karena merupakan dokumen yang harus ada dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan (perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **SASARAN RENSTRA** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **TARGET** | **REALISASI** |
| 4. | Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah | Laporan Keuangan OPD sesuai SAP | Sesuai | Sesuai |

**Tabel 3.4. Indikator Kinerja Utama 4**

Dalam penyusunan laporan keuangan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, sudah berbasis aplikasi FMIS SIMDA yang merupakan aplikasi dari BPKP. Sementara penggunaan SIPD tidak bisa dilakukan karena terkendala sistem. Sehingga secara tersirat dikatakan bahwa laporan keuangan sudah sesuai dengan SAP.

1. **Analisis Capaian Kinerja**
2. **Kontribusi PAD dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap PAD sektor Pariwisata.**

Dibandingkan tahun lalu, pencapaian IKU Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terealisasi sebesar **0,51%** mengalami penurunan menjadi **0,48%**. Penurunan ini disebabkan realisasi PAD sektor Pariwisata meningkat dari tahun lalu dari Rp 2.443.091.790,- menjadi Rp 2.793.836.108,- atau meningkat 14,36% (sebagai pembagi) sementara kenaikan PAD disparbud hanya Rp 1.029.000,-.

Sementara Target Bidang Destinasi yaitu peningkatan PAD Disparbud 2022 dari tahun 2021 sebesar 10% adalah

((Rp 13.529.000,- - Rp 12.500.000,-)/Rp 12.500.000,-)x 100% = **8,2%**

Dalam arti, tidak memenuhi target yang telah ditetapkan.Hal ini disebabkan belum maksimalnya pengelolaan retribusi tempat rekreasi Tamamelong dan belum adanya bentuk kerjasama antara Disparbud dan Bumdes Bontomarannu terkait pengelolaan Puncak Tana Doang.

Namun, bila dilihat dari kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten secara keseluruhan mengalami peningkatan dari 4,45% (2021) menjadi 5,15% (2022). Hal ini disebabkan menurunnya PAD Kabupaten dari Rp 54.956.201.151.84,- (tahun 2021) menjadi Rp 54,165.561.423,63,- (tahun 2022) sementara PAD sektor pariwisata meningkat seperti yang dijelaskan di atas.

Dari hasil pengukuran kinerja, terlihat bahwa Kontribusi PAD dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap PAD sektor Pariwisata masih sangat minim. Hal ini disebabkan kurangnya kemauan dan kesungguhan dan pengetahuan dalam perencanaan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pemilihan prioritas kegiatan, dan juga dukungan anggaran.

Dari sisi perencanaan program kegiatan dapat kita lihat lemahnya perencanaan kinerja dari PK setiap Bidang dalam menurunkan PK Kepala Dinas. Kebanyakan PK yang dibuat berdasarkan kegiatan yang ada bukan berdasarkan target renstra dinas yang telah ditetapkan.

Berikutnya terkait program kegiatan yang diprioritaskan kadang tak langsung menyentuh masalah yang harus diselesaikan. Penyusunan Renja hingga menjadi DPA terlihat bahwa program kegiatan ditentukan sesuai pembagian pagu dan intervensi dari pemangku kepentingan, bukan pagu menyesuaikan terhadap program kegiatan atau diistilahkan money follow program.

Selain masalah di atas juga masalah pagu untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang tidak mencerminkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah OPD utama yang harus didukung. Pagu sudah tak mencukupi, ditambah lagi program kegiatan OPD-OPD lain jarang mendukung bahkan tidak mendukung sama sekali. Semua hanya selesai diatas kertas namun kenyataan jauh api dari panggang.

1. **Persentase warisan budaya benda dan tan benda yang menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari**

Persentase 40% mungkin lebih mendekati dari kenyataan yang ada sekarang. Yang disebabkan oleh tidak adanya intervensi langsung kesasaran terkait tergerusnya kebudayaan selayar oleh zaman. Pengaruh perkembangan teknologi, kecepatan informasi antar daerah bahkan negara, kebiasaan yang berubah terkait benturan budaya dari luar, menyebabkan budaya daerah sudah sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan. Kebudayaan daerah di Selayar hanya dapat dilihat bila ada penyambutan tamu penting, atau ada lomba-lomba hingga bila ada acara penting seperti Hari Jadi Selayar, itupun kalau tersedia anggaran pelaksanaannya. Dari anggaran yang digunakan lebih banyak berkutat terkait administrasi saja bukan langsung pembinaan langsung yang menyentuh pokok masalah. Ini juga diakibatkan dari rendahnya pagu di Disparbud padahal Disparbud mengampu 2 (dua) urusan pemerintahan. Sehingga bisa diramalkan 10 tahun bahkan kurang dari itu sudah sulit orang menjumpai kebudayaan asli Selayar.

1. **Nilai akumulasi komponen SAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**

Evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas pariwisata dan kebudayaan meliputi 5 komponen, yaitu terkait perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian kinerja. Dalam pelaksanaan perencanaan kinerja, sudah dilaksanakan sesuai dari jadwal yang ditetapkan oleh Bappelitbangda, mulai dari penyusunan Renja, hingga penginputan RKA dan DPA. Begitu juga terkait pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pemcapaian kinerja juga telah tercantum dalam laporan Lakip ini.

1. **Laporan Keuangan OPD sesuai SAP**

Berdasarkan regulasi PP. Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam tindak penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah. Dalam laporan keuangan itu, terdiri atas Neraca , Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, juga Catatan Laporan Keuangan. Kesemua ini sudah ada dalam Aplikasi yang digunakan yaitu FMIS SIMDA.

1. **Realisasi Keuangan**

Realisasi keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan T.A. 2022, dapat dilihat pada laporan RFK yang kami lampirkan dalam laporan ini. Secara singkat, Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di DPA Pokok T.A. 2022 sebesar **Rp. 9.616.278.525,-**. Namun di bulan Maret 2022 Anggaran tersebut mengalami pergeseran pagu menjadi **Rp. 9.254.700.132,-** dan kemudian di bulan Oktober 2022 di DPA-P 2022 kembali mengalami perubahan menjadi **Rp. 8.860.983.100,-**.

Dari laporan RFK per 31 Desember 2022 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dapat disebutkan bahwa dari pagu Rp. 8.860.983.100,- (pagu perubahan) direalisasikan sebesar **Rp. 8.439.502.956,-** atau sebesar **95,24%** dengan realisasi fisik sebesar **100%**.

**BAB IV**

**PENUTUP**

Pembangunan yang dilakukan melalui Sektor Pariwisata dan Kebudayaan tidak akan dapat mencapai target jika tidak di dukung oleh Sektor-sektor lainnya. Sehingga seberapa pun besar pagu yang diberikan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bukanlah menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan Sektor Pariwisata dan Kebudayaan.

Banyak kelemahan yang masih ditemukan di sana sini terutama terkait pengelolaan Destinasi Pariwisata dan Kemitraan Pariwisata. Bila pengelolaan Destinasi Pariwisata dilakukan secara profesional maka kontribusi PAD dari Dinas Pariwisata terahadap sektor pariwisata dapat melebihi target. Selain itu Kemitraan Pariwisata yang kurang disentuh sehingga pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar tidak memiliki nilai tawar yang akan menjadikan sinergitas dengan daerah lain.

Penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien juga menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan. Pariwisata harus memberi kontribusi besar terhadap PAD kabupaten karena potensi yang dimilikinya, jangan menjadi sektor yang justru memboroskan anggaran sehingga menjadi penghambat atau beban bagi daerah.